

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Politik Hukum Terkait Pengaturan Hukuman Bagi Koruptor Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Studi Perbandingan Dengan Negara Cina dan neNegara Korea Selatan)” ini ditulis oleh Dara Suciati, NIM. 126103201015, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, di bombing oleh Ahmad Gelora Mahardika, S.IP.,M.H

Kata kunci: *Politik Hukum, Korupsi, Hukuman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Cina, Korea Selatan.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam upaya Indonesia untuk menangani kasus korupsi dengan tegas dan efektif. Penelitian ini melakukan analisis terperinci terhadap politik hukum yang mengatur hukuman bagi koruptor dalam undang-undang tersebut, dengan membandingkan pendekatan Indonesia dengan Cina dan Korea Selatan. Studi perbandingan terhadap Cina menunjukkan adopsi strategi hukuman yang keras dan tegas terhadap koruptor, termasuk hukuman mati atau hukuman seumur hidup bagi pelanggar korupsi berat. Pendekatan ini menunjukkan kecenderungan otoritarian yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan membatasi perilaku koruptif. Di sisi lain, Korea Selatan mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang antara pencegahan dan penindakan korupsi. Mereka fokus pada reformasi sistemik, pendidikan, dan pemantauan yang ketat terhadap kegiatan ekonomi serta pemberian hukuman yang proporsional bagi koruptor. Analisis politik hukum terhadap ketiga negara ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dalam merancang kebijakan hukuman bagi koruptor. Implikasi dari studi ini memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan di Indonesia untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam menangani korupsi, sekaligus mengambil inspirasi dari pendekatan yang berhasil dalam negara lain.

ABSTRACT

This thesis with the title " Legal Politics Related To Punishment For Corruptors In Law Number 1 Of 2023 (Comparative Study With China And South Korea)" was written by Dara Suciati, NIM. 126103201015, Constitutional Law Study Program (HTN), Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung, supervised by Ahmad Gelora Mahardika, S.IP., M.H.

Keywords: *Legal Politics, Corruption, Punishment, Law Number 1 of 2023, China, South Korea.*

Law Number 1 of 2023 is an important milestone in Indonesia's efforts to handle corruption cases firmly and effectively. This research carries out a detailed analysis of the legal politics governing punishment for corruptors in this law, by comparing Indonesia's approach with China and South Korea. Comparative studies of China show the adoption of harsh and strict punishment strategies against corruptors, including the death penalty or life imprisonment for serious corruption offenders. This approach shows an authoritarian tendency which aims to provide a deterrent effect and limit corrupt behavior. On the other hand, South Korea adopts a more balanced approach between preventing and suppressing corruption. They focus on systemic reform, education, and strict monitoring of economic activities as well as providing proportional punishment for corruptors. Legal political analysis of these three countries provides a deep understanding of the complexity of designing punishment policies for corruptors. The implications of this study provide insight for policy makers in Indonesia to evaluate and improve the effectiveness of Law Number 1 of 2023 in dealing with corruption, while taking inspiration from successful approaches in other countries.